**KONSTRUKSI SOSIAL PENDIDIKAN INKLUSI**

**Oleh**

**BASTIANA**

**(Dosen UNM Makassar)**

**ABSTRAK**

Pendidikan inklusi merupakan sauatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagi satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. pendidikan inklusi di sekolah dibangun secara sosial karena pendidikan inklusi adalah sebuah fenomena yang dibentuk oleh adanya tindakan sosial, dimana siswa mendapatkan pengetahuan melalui sosialisasi diantara mereka sehingga menjadi komunitas tertentu dalam nuansa proses belajar mengajar. Pendidikan inklusi merupakan produk tindakan sosial baik sebagai realitas objektif maupun realitas subjektif. Konstruksi sosial yang dimaksud bukan konstruksi sosial untuk menggambarkan siswa berkebutuhan khusus sebagai orang lain, tetapi sebagai bagian integral dari dunia normal.

Kata kunci: pendidikan inklusi, konstruksi sosial

**PENDIDIKAN INKLUSI**

Pendidikan inklusi dapat diartikan sebagai filosofi dan praktek untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus dalam pengaturan pendidikan umum (Ajuwon, 2009: Bryant, Smith, & Bryant, 2008: Salend, 2001). Dasar pemikirannya bahwa setiap anak harus menjadi anggota yang sama dari budaya sekolah. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus mengambil manfaat dari kelasnya, sementara anak normal belajar tentang keragaman karakteristik dan sifat.

Pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dan berinteraksi dengan guru dan siswa normal di kelas. Interaksi yang terbangun antara siswa normal dengan siswa normal tentu berbeda antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus. Kekhususan yang dimiliki siswa secara jelas akan mempengaruhi bentuk interaksi tersebut, misalnya interaksi anak normal dengan anak yang mengalami gangguan wicara, untuk dapat berinterkasi dengan baik anak normal harus bisa memahami kata yang diucapkan secara lambat dan tidak jelas, bahkan kadang-kadang hanya berupa isyarat. Begitu pula sebaliknya, anak berkebutuhan khusus akan berusaha mengikuti setiap pembicaraan. Belum lagi kalau terdapat dua atau tiga siswa berkebutuhan khusus dengan kekhususan yang berbeda dalam kelas. Mereka berinteraksi dengan caranya masing-masing dan dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan akibat kekhususan tersebut. Mereka memang memiliki keragaman dan keserbaragaman, tetapi bukan itu yang membuat mereka harus menjadi minoritas di kelasnya. Menurut Skjorten (Johnsen dan Skjorten, 2004: 39) kita tidak membicarakan tentang minoritas anak berkebutuhan khusus, tetapi kita membicarakan tentang sejumlah besar anak termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, kita membicarakan anak yang bersekolah.

Anak-anak datang ke sekolah akan ditantang dengan tugas yang diberikan oleh guru untuk berpartisipasi dalam situasi sosial yang kompleks dalam kelas. Apapun bentuk tugas yang diberikan baik individu maupun kelompok mengharuskan siswa mengambil peran dalam situasi kelas. Sebagai bagian dari organisasi kelas, anak berkebutuhan khusus juga harus ikut menunjukkan perannya bersama dengan anak normal. Dengan guru, terjadi hubungan timbal balik sebagai konsekuensi dari proses belajar mengajar yang dinamis. Peran guru bukan lagi sebagai pendominasi pembicaraan sebagaimana dalam komunikasi satu arah, tetapi siswa juga berhak menyampaikan sesuatu, apakah itu dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan terlepas dari kekhususan yang dimilikinya. Penting dari semua itu adalah bahwa siswa berkebutuhan khusus telah menjadi bagian dari kelas sebagaimana ciri sekolah atau kelas yang inklusif.

Pendidikan sebagai hak untuk semua anak telah tercantum dalam berbagai instrumen internasional mulai dari Deklarasi Universal 1948. Pasal 6 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asazi Manusia mengemukakan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan” menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun demikian, bukan berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan dapat dengan mudah diakses oleh anak berkebutuhan khusus pada saat itu. Masih membutuhkan waktu yang lama untuk menerima anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan yang layak dan bermakna.

Hak untuk memperoleh pendidikan di dalam sistem pendidikan umum dan tidak didiskriminasikan telah disorot dalam instrumen-instrumen yang lebih rinci seperti deklarasi Jomtien dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*World Declaration on Education For Al*l) di Jomtien Thailand tahun 1990 mencoba untuk menjawab beberapa tantangan ini. Deklarasi Jomtien tersebut melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam Pasal III tentang “Universalisasi Akses dan Mempromosikan Kesetaraan”. Dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan dan bahwa berbagai kelompok tertentu rentang akan diskriminasi dan eksklusi. Ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan anak pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya, dan secara khusus disebutkan para penyandang cacat.

Namun, hak atas pendidikan tidak secara otomatis mengimplikasikan inklusi. Hak atas Pendidikan Inklusif yang paling jelas telah dinyatakan dalam Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi di Salamanca Spanyol menekankan bahwa sekolah membutuhkan perubahan dan penyesuaian. Prinsip mendasar dari sekolah inklusif adalah bahwa semua anak-anak harus belajar bersama, sedapat mungkin, terlepas dari kesulitan atau perbedaan mereka (UNESCO,1994: 11-12). Implikasinya bahwa anak berkebutuhan khusus dan anak normal belajar bersama dalam kelas. Kesulitan-kesulitan dan perbedaan-perbedaan yang dihadapi akibat kekhususannya tidak menjadi halangan untuk belajar bersama. Oleh karena itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi harus menyediakan sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat mengakomodasi kekhususan anak berkebutuhan khusus, bagaimanapun bentuk dan derajat kekhususan tersebut. Pernyataan Salamaca menekankan pentingnya setiap sekolah Inklusif mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang beragam dari anak, baik mengakomodasi gaya yang berbeda dan derajatnya dalam sebuah *frame work on action.*

Anak kebutuhan khusus dianggap sebagai anggota masyarakat. Mereka harus dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat dan budaya, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan lingkungan sekitar, dan kelompok. Dengan kata lain, inklusi menciptakan ruang di mana anak-anak dengan kebutuhan khusus diterima oleh anggota masyarakat lainnya dengan cara yang sama dengan anak-anak tanpa cacat terima. keluarga, guru, dan anggota staf di sekolah harus menyediakan dasar untuk pengembangan optimal. Dalam pengaturan inklusif, anak-anak terlibat dalam kegiatan yang terjadi secara alami, mereka biasanya berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa berkembang di masyarakat, dan mempelajari keterampilan yang sesuai perilaku sosial dan adaptif.

Pembelajaran menuju pendidikan inklusif berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menuju pendidikan inklusif adalah terbuka untuk menerima perbedaan anak yang heterogen ditangani oleh tenaga, dari berbagai profesi sebagai satu tim, sehingga kebutuhan individual setiap anak dapat terpenuhi, hal ini tentu saja menuntut banyak perubahan pada sistem pembelajaran konvensional, seperti yang dipakai di Indonesia sekarang, ”Guru biasa”, perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menangani kelas yang heterogen, perlu dikembangkan iklim kerjasama tim dari berbagai tenaga profesional, dan sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan semua anak luar biasa belajar di sekolah tersebut.

Prinsif pendidikan yang disesuaikan dalam sekolah inklusi menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap pendidikan reguler maupun pendidikan khusus. Ini menuntut pergeseran besar dari tradisi “mengajarkan materi yang sama kepada semua anak di kelas” menjadi “mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individualnya tetapi dalam setting kelas”. Siswa mempunyai bermacam-macam minat, bidang dan tingkat penguasaan, komunikasi dan strategi belajar, kecemasan dan kekhawatiran. Siswa-siswa tertentu memiliki kebutuhan khusus dan memerlukan bantuan dengan alasan yang berbeda-beda. Mungkin juga terdapat beberapa hambatan belajar dan kebutuhan akan dukungan khusus karena kesulitan atau kecacatan mereka. Misalnya, seperti kesulitan membaca, hambatan sensori-motorik atau fisik, gangguan perkembangan atau gabungan beberapa kecacatan yang dikombinasikan dengan sebab-sebab lain. Menurut Johnsen (2012; 1) bahwa di setiap kelas sudah barang tentu, diperlukan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk mengadaptasikan lingkungan belajar dengan tingkat penguasaan, kemungkinan, dan hambatan belajar untuk semua anak. Guru mempunyai tugas untuk mengadaptasikan lingkungan belajar dengan kebutuhan setiap siswa di kelas. Jadi kelas merupakan tempat bertemunya pendidikan reguler dan pendidikan berkebutuhan khusus.

Sementara siswa berada dalam pusat perhatian, terdapat sejumlah faktor yang menentukan pilihan pendidikan inklusi. Johnsen (2012; 5) mendeskripsikan sekolah sebagai pusat institusi tergantung kepada dan beroperasi di dalam kerangka kerja yang terdiri dari beberapa faktor seperti perundang-undangan, ekonomi, serta sumber daya manusia serta sejumlah aspek fisik, sosial dan budaya. Perundang-undangan dan dokumen kebijakan pendidikan mendeskripsikan hak-hak, kewajiban, dan tujuan umum pendidikan. Dalam kebanyakan kasus, walaupun tidak semuanya, aturan-aturan tersebut terkait dengan prinsif-prinsif yang sudah disepakati secara internasional, seperti prinsif pendidikan inklusi. Undang-undang tetang pendidikan inklusi di Indonesis telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2003. Jonhsen memberikan rambu-rambu bahwa dalam menyusun kurikulum, perundangan-undangan dan kebijakan nasional perlu diinterpretasi dalam proses mengadaptasikannya dengan situasi pendidikan yang konkrit. Perundang-undangan dan kebijakan itu juga perlu dikaitkan dengan faktor-faktor kerangka kerja lainnya dan aspek-aspek utama yang menjadi sisi kurikulum.

**PROSES KONSTRUKSI SOSIAL PENDIDIKAN INKLUSI**

Menempatkan siswa berkebutuhan khusus bersama dengan siswa reguler di dalam kelas membutuhkan perencanaan yang matang agar mereka dapat saling menerima. Artinya siswa reguler dapat menerima kekhususan siswa berkebutuhan khusus dan siswa berkebutuhan khusus menerima perbedaan dirinya dengan siswa reguler. Skjorten (Skjorten dalam Johnsen dan Skjorten, 2004, 49), mengemukakan bahwa suatu sekolah dikatakan menerapkan sistem pendidikan inklusi jika semua anak dianggap sebagai anggota dari kelompok yang sama dengan adanya (1) saling interaksi dan komunikasi diantara mereka, (2) saling membantu dalam belajar dan menjalankan fungsinya, (3) saling tenggang rasa, dan (4) penerimaan bahwa beberapa anak mempunyai kenutuhan yang berbeda dibandingkan mayoritas anak dan pada waktu tertentu akan berbuat hal yang berbeda. Untuk menjadi kelas atau sekolah inklusif seperti ciri-ciri yang dikemukakan oleh Skjorten, memerlukan proses konstruksi sosial tentang pendidikan inklusi oleh siswa.

Proses konstruksi sosial dalam teorinya dimulai dengan pengkajian tentang realitas sosial. Berger (1994. 3) menggambarkan bahwa realitas sosial tak terpisah dari aktivitas sosial manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa manusia adalah suatu produk masyarakat. Namun demikian, sebelum keluar menjadi produk dalam masyarakat, menurut Berger telah melalui proses sosial dan di dalam masyarakat itulah proses itu berlangsung. Hasilnya, individu menjadi pribadi, memperoleh dan berpegang pada suatu identitas dan melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari kehidupannya. Kesimpulannya melahirkan dua pernyataan bahwa masyarakat adalah produk manusia dan manusia adalah produk masyarakat (Berger 1994. 4). Kelihatannya berlawanan, sesungguhnya tidaklah demikian. Justru keduanya menggambarkan dialektika realitas sosial dalam masyarakat. Untuk menjelaskan pernyataan ini Berger menggunakan dua asumsi tentang masyarakat. Pertama, adalah asumsi dari Durhkeim bahwa masyarakat merupakan realitas objektif sebagaimana sebuah fakta, dan kedua, adalah asumsi Weber bahwa masyarakat adalah hasil pemaknaan subyektif.

Durkheim melihat suatu pertanyaan mendasar dan perlu mendapat tekanan tentang kenyataan gejala sosial yang objektif. Pertanyaan itu menyangkut sifat dasar kenyataan itu, bahwa fakta sosial tidak dapat direduksikan ke fakta individual, melainkan memiliki eksistensi yang independen pada tingkat sosial (Jonhson, 1991. 175). Independensinya dapat dilihat pada situasi dimana realitas sosial dapat ditangkap tanpa harus mengetahui pengalaman hidup dari tiap individu. Apa yang tampak dalam realitas kehidupan sehari-hari, dan apa yang dilakukan oleh individu yang terlibat di dalamnya, itulah yang menjadi faktanya. Durkheim berasumsi bahwa pada realitas sosial ada sebagian kesadaran kolektif yang mengatur dan mengarahkan individu (Riyanto, 2009, 72). Bahkan dalam pandangan Vegeer, kesadaran kolektif akan melebihi jumlah total kesadaran individual, karena pikiran, perasaan, dan perilaku masyarakat berbeda dan berlainan dengan pikiran, perasaan dan perilaku individu (Veeger, 1986, 145).

Kesadaran kolektif akan melahirkan perilaku kolektif dalam kelompok. Tetapi tidak semua perilaku dalam kelompok dicirikan sebagai perilaku kolektif. Ada pranata yang menjadi ciri dari perilaku yang tergolong perilaku kolektif, Menurut Stewart (1981, 297) yaitu bahwa sebagian besar individu setuju dengan nilai dan norma yang ada dalam kelompok, mempunyai tradisi yang kuat, dan konflik yang ada hanya sedikit bahkan cenderung tidak muncul oleh kuatnya solidaritas kelompok. Nilai membantu mempersatukan anggota sebuah kelompok berkenaan dengan dengan kualitas sekolah atau perusahaan. Nilai ini dipandang sebagai kesamaan perasaan di tingkat kolektif yang mempersatukan individu atas dasar hubungan tatap muka.

Apa yang dikemukakan oleh Durkheim tentang realitas sosial dalam masyarakat tidaklah lengkap karena hanya melihat masyarakat sebagai produk manusia. Menurut Berger, pada taraf tertentu manusia dipandang sebagai makhluk yaqng bertindak mengikuti panggilan mencari keteraturan, tetapi pada taraf selanjutnya, manusia merupakan makhluk yang memiliki kebebasan berpikir dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya sendiri (Riyanto, 2009, 80). Untuk melengkapinya, Berger mengutip asumsi dari Weber tentang realitas yang ada dalam masyarakat adalah hasil pemaknaan.

Berbeda dengan Durkheim, Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial (Jonhson, 1991. 14). Artinya bahwa individulah yang memiliki tempat yang nyata secara objektif, sebaliknya masyarakat hanyalah suatu nama yang menunjuk pada sekumpulan individu-individu. Konsep struktur sosial atau tipe-tipe fakta sosial lainnya yang lebih dari pada individu dan perilakunya serta transaksinya dianggap hanyalah abstraksi spekulatif tanpa dasar suatu apapun dalam dunia empiris. Oleh karena itu Weber lebih menekankan arti-arti subjektif dari realitas sosial (Jonhson, 1991. 15). Arti yang dimaksud Weber, tidak terdiri dari pengertian-pengertian yang khas untuk seseorang, tetapi arti yang pada umumnya diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu keadaan konkrit sehingga ketika individu yang membentuk kelompok akan menghayati keanggotaan mereka sebagai sesuatu yang bermakna dan mengarahkan kelakukan mereka sesuai dengan penghayatan mereka (Veeger, 1986; 175-176).

Walau terjadi perbedaan mendasar antara Durhkeim dengan Weber dalam memandang realitas sosial, namun masing-masing memiliki akurasi atau kebenarannya sendiri-sendiri. Berger menyatukan akurasi yang dimiliki oleh kedua pandangan itu dengan menggambarkan dialektika inheren dari fenomena masyarakat. Berger menggambarkan dialektika fundamental masyarakat melalui tiga momentum atau langkah yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi (Berger, 1991; 4).

Berger mendefinisikan eksternalisasi sebagai proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya (Berger, 1991; 4-5). Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu ruang lingkup yang tertutup dan berdiam di dalamnya, tetapi berada dalam suatu dinamisasi aktivitas dengan mengekspresikan diri dalam dunia sekelilingnya. Kedirian manusia adalah melakukan eksternalisasi dan terjadi sejak awal, karena ia dilahirkan belum selesai. Pada perkembangannya manusia, Berger melihat bahwa menjadi manusia dimulai sejak lahir, secara biologi ketika manusia lahir telah menjadi organisme yang dianggap lengkap, tetapi pada dasarnya itu belumlah lengkap karena belum dianggap menjadi manusia. Proses menjadi manusia terjadi ketika manusia berada dalam interaksi dengan suatu lingkungan ekstra-organismik yang merupakan dunia fisis dan dunia manusia. Teori perkembangan manusia juga mencatat bahwa manusia lahir dengan membawa potensi-potensi yang yang dibutuhkan dalam hidupnya. Potensi-potensi ini akan tereksplorasi melalui interaksinya dengan lingkungan (Papalia dan Old, 1986; 6).

Dunia manusia adalah suatu dunia yang harus dibentuk oleh aktivitas manusia sendiri. Aktivitas manusia dalam menghasilkan kebudayaan selalu merupakan aktivitas kolektif. Manusia secara bersama-sama menciptakan alat-alat, bahasa, nilai-nilai, membentuk institusi, dan sebagainya. Ada partisipasi secara individual tetapi partisipasi itu tergantung pada proses sosial dan terpeliharanya aturan-aturan sosial tertentu. Karena itu, masyarakat tidak hanya merupakan hasil dari kebudayaan, tetapi juga merupakan kondisi yang diharuskan oleh kebudayaan itu. Masyarakat membentuk, membagi dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas pembentukan kebudayaan. Bukan hanya sampai disitu, dalam masyarakat, produk-produk dalam aktivitas-aktivitas itu bisa bertahan dalam waktu yang lama.

Momen obyektivasi adalah momen transformasi produk-produk manusia ke dalam suatu dunia. Produk-produk tadinya berasal dari manusia karena manusia adalah produser kemudian menghadapi manusia sebagai sebagai faktisitas di luar dirinya. Produk-produk manusia baik yang berupa material maupun non material kini berada di luar diri manusia. Meskipun semua produk kebudayaan berasal dari, berakar dalam kesadaran subyektif manusia, namun produk tidak serta merta dapat diserap kembali begitu saja dalam kesadaran manusia. Dunia yang diproduksi manusia mempunyai sifat realitas obyektif (Berger, 1991; 11-12). Terdapat makna ganda pada penerapan status objetivitas terhadap suatu kebudayaan. Bahwa kebudayaan itu ada di luar sana yang berarti bahwa kebudayaan menghadapi manusia sebagai suatu kelompok benda-benda dalam dunia nyata yang eksis di luar kesadarannya sendiri. Kebudayaan juga objeitif dalam hal bahwa ia bisa dialami dan diperoleh secara kolektif, sehingga kebudayaan tersedia disana bagi semua orang.

Semua aktivitas manusia yang terjadi pada momen eksternalisasi dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi) (Berger dan Luckmann, 1990; 75-76). Setiap aktivitas manusia yang sering diulangi, akan menjadi suatu kebiasaan dan berpola. Sebagai ciri dari aktivitas tersebut apabila dilakukan kembali dimasa yang akan datang dengan cara yang sama, dan juga dapat dilakukan dimana saja (Manuaba, 2011; 10). Aktivitas yang telah terpola akhirnya melembaga dalam diri manusia. Pelembagaan terjadi apabila ada tipifikasi yang timbal balik dari tindakan-tindakan yang terbiasakan bagi berbagai tipe pelaku. Tipifikasi tindakan-tindakan yang sudah dijadikan kebiasaan, yang membentuk lembaga-lembaga, merupakan milik bersama. Tipifikasi-tipifikasi itu tersedia bagi semua anggota kelompok sosial tertentu, dan lembaga-lembaga itu mentipifikasi pelaku-pelaku individual ataupun tindakan-tindakannya (Berger dan Luckman, 1990: 77-84, Manuaba, 2011: 12).

Melengkapi deskripsi tentang pelembagaan, menurut Glory (2010) ada empat tahapan proses pelembagaan suatu norma sosial menjadi lembaga sosial yaitu, (1) norma sosial diketahui oleh sebahagian besar anggota masyarakat setempat, artinya orang-orang telah mengetahui bahwa norma sosial tersebut merupakan pedoman untuk bersikap dan dan bertingkah laku, (2) norma sosial telah dipahami (dimengerti) oleh sebahagian besar anggota masyarakat, artinya masyarakat telah memahami bahwa setiap sikap dan tingkah lakunya senantiasa diatur oleh norma sosial yang ada. Pada tahap ini manusia sadar sepenuhnya bahwa norma itu adalah peraturan yang mengatur perilakunya dalam hubungannya dengan masyarakat atau orang lain. Manusia semakin menyadari bahwa setiap perilaku senantiasa terikat pada norma-norma yang berlaku dan apabila norma itu dilanggar, maka seseorang akan mendapat sanksinya yaitu sanksi-sanksi sosial. Kesadaran itu kemudian berkembang menjadi suatu kepatuhan, (3) jika kepatuhan itu benar-benar datang dari kesadaran dan keyakinan masyarakat itu sendiri, bahwa norma-norma sosial itu benar-benar dirasakan telah bermanfaat bagi kehidupannya (masyarakat), maka proses pelembagaan sudah sampai pada tahap yang lebih tinggi, dan (4) jika norma-norma itu telah diketahui, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya, maka mau tidak mau norma tersebut kemudian akan dihargai sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Penghargaan terhadap keberlakuan suatu norma sosial yang ada menunjukkan bahwa norma sosial itu betul-betul telah menjadi lembaga sosial.

Berbicara tentang lembaga sosial, Waluya (2007: 34) mengklasifikasikan munculnya lembaga sosial melalui dua cara yaitu secara terencana dan secara tidak terencana. Secara tidak terencana artinya bahwa lembaga sosial itu lahir secara bertahap (berangsur-angsur) dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adapun cara terencana, yaitu lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Contohnya, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah membentuk Koperasi Unit desa untuk menampung hasil panen petani dan membelnya dengan harga yang menguntunkan.

Pelembagaan bukanlah suatu proses yang stabil walaupun pada kenyataannya lembaga-lembaga sudah terbentuk melalui pembiasaan dan mempunyai kecenderungan untuk bertahan terus. Agar dapat bertahan, perlu diikuti dengan objektivasi makna “tingkat kedua” yang disebut legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat objektivasi “tingkat pertama” yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara objektif dan masuk akal secara subjektif. Legitimasi harus berisi penjelasan-penjelasan dan pembenaran-pembenaran mengenai unsur-unsur penting dari tradisi kelembagaan. Dengan kata lain, legitimasi adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan “mengapa” mengenai suatu kelembagaan. Olehnya itu, legitimasi harus terdiri dari dalil-dalil yang secara teoritis harus dipahami. Namun, sebagaimana halnya kebudayaan, semua legitimasi merupakan buatan manusia.

Pada akhirnya, menurut Berger (1991: 18) objektivasi aktivitas manusia berarti, bahwa manusia jadi mampu mengobjektivasikan bagian dari dirinya di dalam keasadarannya sendiri, menghadapi dirinya di dalam dirinya sendiri dalam gambaran-gambaran yang biasanya tersedia sebagai unsur-unsur objektif dunia sosial. Produk-produk yang dihasilkan manusia melalui proses eksternalisasi akan menjadi sesuatu yang berada di luar diri manusia dan menjadi milik bersama setelah melalui proses legitimasi.

Masyarakat juga dipahami sebagai kenyataan subjektif, yang dilakukan melalui momen internalisasi. Internalisasi penyerapan ke dalam kesadaran dunia yang terobjektivasi sedemikian rupa sehingga struktur dunia ini menentukan struktur subjektif kesadaran itu sendiri (Berger, 1991: 19). Atau dengan kata lain, bahwa internalisasi merupakan menyerapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformaskannya kembali dari struktur-struktur objektif ke dalam struktur-struktur kedasaran subjektif.

Proses internalisasi bukanlah merupakan proses pasif, melainkan merupakan rangkaian psikologik yang sifatnya aktif juga (Narwoko dan Suyanto, 2004: 61). Pertama-tama individu aktif menginterpretasi makna dari apa yang disampaikan kepadanya (yaitu dalam hal sosialisasi diselenggarakan secara formal), atau makna dari apa yang individu saksikan dan hayati (yaitu dalam hal sosialisasi diselenggarakan secara informal dan tidak sengaja). Berger (1991: 19) mempertegas bahwa semua masalah itu diselesaikan dengan proses sosialisasi, suatu proses untuk mendidik generasi baru supaya hidup sesuai dengan program-program kelembagaan masyarakat tersebut.

Keberhasilan sosialisai tergantung pada adanya simetri antara dunia objektif masyarakat dengan dunia subjektif individu (Berger, 1991: 19). Jika individu mengalami sosialisasi secara total, maka setiap makna yang secara objektif terdapat dalam dunia sosial akan mempunyai makna analognya secara subjektif di dalam kesadaran individu itu sendiri. Hanya saja, secara empiris, sosialisasi semacam itu tidak pernah ada, dan secara teoritis tidak mungkin ada. Tetapi untuk melihat keberhasilan sosialisasi dilakukan dengan mengukur tingkat simetri antara dunia objektif dengan dunia subjektif individu. Narwoko dan Suyanto (2004: 63) juga menjelaskan bahwa jika dalam belajar individu bisa memahami dan kemudian menyesuaikan diri dengan perbagai tingkah pekerti yang dijalankan di dalam masyarakat, maka proses sosialisasi berlangsung dengan baik.

Tidak selamanya sosialisasi berhasil. Sosialisasi tidak berhasil jika sosialisasi tidak berhasil menginternalisasi sekurang-kurangnya makna paling penting dari suatu masyarakat tertentu, maka masyarakat itu tidak akan berhasil membentuk tradisi dan menjamin kelestarian masyarakat itu sendiri. Berger dan Luckmann (1990: 239) ketika menjelaskan sosialisasi primer, cenderung melihat bahwa kegagalan sosialisasi dapat disebabkan karena pengasuh yang berlainan mengantarkan berbagai kenyataan objektif kepada individu. Kegagalan sosialisasi dapat merupakan akibat heterogenitas dikalangan personil sosialisasinya. Individu dibentuk, dipelihara, dan dimodifikasi, malahan dibentuk-ulang oleh hubungan-hubungan sosial antara individu dengan orang-orang yang signifikan baginya terlibat sebagai orang yang memberikan dan bertanggung jawab bagi sosialisasi kepada individu yang menerima sosialisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan usaha kolektivitas.

**KESIMPULAN**

Tatanan sosial di sekolah adalah hasil dari tindakan manusia melalui fasilitas-fasilitas yang mengarahkan tindakan siswa untuk berpikir dan berperilaku. Di dalam proses belajar mengajar, terdapat metode-metode mengajar yang memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok sosial antar siswa. Seperti metode diskusi, metode pemberian tugas kelompok, atau metode proyek. Metode-metode ini ada dalam kukikulum, mempunyai aturan tersendiri, kemudian guru mempunyai otoritas untuk menerjemahkan konsep-konsepnya ke dalam situasi nyata di lapangan. Setiap metode mempunyai kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan metode lain, dan setiap metode disesuaikan dengan sifat dan ciri dari materi pembelajaran. Artinya tidak semua materi cocok untuk semua metode. Pemilihan metode berpulang kepada kompetensi guru dalam mengenali sifat dan ciri materi pembelajaran. Terdapat kegiatan-kegiatan yang menjadi instrumen terbentuknya persepsi bersama tentang pendidikan inklusi.

Memang tidak secara langsung dideskripsikan oleh siswa dengan penjelasan-penjelasan lisan atau tertulis, seperti ketika siswa menjawab pertanyaan “Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi?” atau “Apakah kamu mengetahui kriteria-kriteria pendidikan inklusi?”. Ada kemungkinan siswa tidak mampu menjawabnya, mungkin juga menjawabnya tetapi tidak jelas maksudnya. Tetapi ketika siswa mampu menampilkan fenomena sehari-hari dalam berinteraksi mereka mampu menjawab secara tidak langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka mempresentasikan kehidupan sehari-hari konsep-konsep tentang pendidikan inklusi seperti dalam pemahaman yang sebenarnya. Walaupun tidak secara spesifik tertuang dalam bentuk verbal bahwa mereka telah memiliki kesepakatan tentang pendidikan inklusi, tetapi secara nonverbal, simbol-simbol yang menjadi kriteria pendidikan inklusi telah terbangun diantara mereka. Bahwa mereka bisa berada dalam kelompok yang sama, mereka bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Bahwa mereka mengakui kalau mereka memang berbeda tetapi mereka saling menerima perbedaan.

Jika fenomena dalam menerima perbedaan telah ditampilkan sehari-hari siswa dalam interaksinya di sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa proses konstruksi sosial tentang melalui tiga momen yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi secara simultan dan berdialektika, telah berlangsung.

**DAFTAR PUSTAKA**

Allan, J. 2008. *Rethinking Inclusive Education: The Philosophers of Difference in Practice.* United Kingdong: Springer.

Berger, Peter L., dan Hansfried Kellner. 1985. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*. Terj. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES.

..........................., dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.

............................ 1994. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.

Glory, Ravelt. 2010. *4 Tahapan Proses Pelembagaan Suatu Norma Sosial*. www. raveltglory.blogspot.com/2010/04. Diakses tanggal 20 desember 2011.

Horton, P. B. & Hunt, C. L. *Sosiologi* edisi kedelapan. Alih Bahasa Amiruddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Jonhsen, B. H & Skjorten, M. D. (ed). 2004. *Menuju Inklusi, Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar Buku No. 1*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Johnson, D. P. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia.

........................ 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*, diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia.

*……………….. 2008. Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach. .* New York:3 Springer Science + Business Media, LLC.

Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2004. *Sosiologi Teks pengantar dan Terapan*. Jakarta: Predana media.

Riyanto, Geger. 2009. *Peter L Berger, Perspektif Metateori pemikiran*. Jakarta, LP3ES.

UNESCO. 1990. *World Declaration on Education For All.* http//www.unesco.org/education/wef/en-conf/jomtien.shtm. Diakses tanggal 20 Juli 2010.

…………. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education.* Adopted by the World Conference on Special Needs Education: Access and Quality. Salamanca, Spain, 7-10 June 1994.

UNICEF. 2004. *Menjadikan Lingkungan Inklusif, Ramah Terhadap Pembelajaran, Buku 1*. Adaptasi Versi Indonesia Oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa dan Braillo Norway.

Veeger, K. J. 1985. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia.

Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat 3.* Jakarta, PT Setia Purma Invest.